

Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Baubau Tahun 2018-2022

Muhammad Rais R.

Universitas Muhammadiyah Buton
Jalan Betoambari No. 36 Kota Baubau Sulawesi Tenggara
Email : raismuhamad000@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah kota Baubau tahun 2018-2022. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah Penelitian lapangan (*field research*) dan Penelitian kepustakaan (*library research*). Metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif dengan menggunakan rasio keuangan Pemerintah daerah. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Kinerja keuangan pemerintah daerah kota Baubau jika dilihat dari rasio kemandirian keuangan daerah tergolong rendah sekali, karena masih tergolong dalam interval 0%-25%. Berturut-turut dari tahun 2018 sampai dengan 2022 rasionya masing-masing sebesar: 9,99%; 11,86%; 11,93%; 13,13% dan 14,10%. (2) Kinerja keuangan pemerintah daerah kota Baubau jika dilihat dari rasio efektivitas PAD diketahui bahwa efektivitas keuangan Pemerintah Daerah Kota Baubau tahun 2018, 2020, 2021 dan 2022 berjalan cukup efektif yang ditunjukkan dengan nilai rasio antara 90% - 99% secara berturut-turut sebesar 92,63%, 84,63%, 85,50% dan 93,50%, namun pada tahun 2019 berjalan sangat efektif dengan nilai rasio mencapai 107,3%. (3) Rasio aktivitas dari sisi rasio belanja operasi tergolong baik yakni dengan nilai rasio antara 50%-100% atau dengan nilai rata-rata 75,78% per tahun sedangkan rasio belanja modal tergolong tidak baik karena memiliki nilai rasio kurang dari 50% atau dengan nilai rata-rata pertahun sebesar 22,64% per tahun). (4) Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Baubau mengalami perkembangan dari tahun ke tahun dengan kategori pertumbuhan rendah (1,20%) untuk tahun 2020, namun rasio pertumbuhan pada tahun 2019 mengalami peningkatan yakni dengan kategori pertumbuhan sedang (27,71%), dan di tahun 2021 kembali mengalami peningkatan walaupun dengan kategori pertumbuhan rendah (9,83%) dan tahun 2022 kembali mengalami peningkatan walaupun dengan kategori rendah (12,01%).

Kata Kunci : *Pemerintah Daerah, Kinerja Keuangan*

Abstract

This study aims to analyze the financial performance of the Baubau city local government in 2018-2022. The data collection method used is field research and library research. The data analysis method used is quantitative descriptive method using local government financial ratios. Based on the research results show that: (1) The financial performance of the Baubau city local government when viewed from the ratio of regional financial independence is classified as very low, because it is still classified in the interval 0%-25%. Consecutively from 2018 to 2022 the ratios are respectively: 9.99%; 11.86%; 11.93%; 13.13% and 14.10%. (2) The financial performance of the Baubau city local government when viewed from the PAD effectiveness ratio shows that the financial effectiveness of the

Baubau City Local Government in 2018, 2020, 2021 and 2022 is quite effective as indicated by the ratio value between 90% - 99% successively amounting to 92.63%, 84.63%, 85.50% and 93.50%, but in 2019 it is very effective with a ratio value reaching 107.3%. (3) The activity ratio in terms of operating expenditure ratio is classified as good, namely with a ratio value between 50%-100% or with an average value of 75.78% per year, while the capital expenditure ratio is classified as unfavorable because it has a ratio value of less than 50% or with an average annual value of 22.64% per year). (4) The growth of Regional Original Revenue (PAD) in Baubau City has developed from year to year with a low growth category (1.20%) for 2020, but the growth ratio in 2019 has increased, namely with a medium growth category (27.71%), and in 2021 it has increased again even though with a low growth category (9.83%) and in 2022 it has increased again even though with a low category (12.01%).

Keywords: *Local Government, Financial Performance*

PENDAHULUAN

Otonomi daerah adalah hak wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adanya otonomi daerah tersebut pemerintah diberi keluluasaan untuk mengelola sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kepentingan, prioritas dan potensi daerah itu sendiri. Adanya otonomi daerah tersebut pemerintah diberi keluluasaan untuk mengelola sumber daya dan mempertanggung jawabkan kepada masyarakat sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah diperlukan adanya sistem desentralisasi secara transparan, efektif dan efisien dan dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat luas. Pertanggung jawaban pemerintah kepada publik yang bersih merupakan tuntutan yang harus dipenuhi oleh pemerintah, dimana untuk mewujudkannya memerlukan media tertentu. Salah satu alat untuk memfasilitasi tercapainya laporan keuangan pemerintah daerah yang kompetitif yaitu laporan keuangan pemerintah daerah tersebut digunakan untuk membandingkan kinerja keuangan yang akurat dengan anggaran, menilai kondisi dan hasil operasional, membantu menentukan tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang terkait dengan masalah keuangan dan ketentuan lainnya serta membantu mengevaluasi tingkat efisien dan efektivitas.

Pengukuran kinerja untuk kepentingan publik dapat dijadikan evaluasi dan memulihkan kinerja dengan pembandingan skema kerja dan pelaksanaannya. Selain itu dapat juga digunakan sebagai tolak ukur untuk peningkatan kinerja pemerintah daerah pada periode berikutnya. Pengukuran kinerja dapat menggunakan analisis rasio keuangan daerah terhadap laporan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang terdiri dari rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas dan efisiensi pendapatan asli daerah, rasio aktivitas, debt service coverage ratio dan rasio pertumbuhan (Halim, 2014). Jadi analisa kinerja keuangan ini sangat penting karena dapat dijadikan pedoman untuk perbaikan kinerja dimasa yang akan datang, menunjukkan arah pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan, memonitor dan mengevaluasi kinerja, membantu mengungkapkan dan memecahkan masalah yang ada. Realisasi Anggaran Kota Baubau Tahun 2018-2022 ditunjukkan pada tabel 1.

**Tabel 1. Realisasi Anggaran Kota Baubau Tahun 2018-2022
(Dalam ribuan Rupiah)**

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022

A	PENDAPATAN	817.299.798.19 5	889.152.025.13 0	844.809.137.70 2	860.400.648.5 09	892.074.2 15.918
1	Pendapatan Asli Daerah	67.321.910.993	85.976.625.925	87.011.274.771	95.566.805.178	107.046.315.216
2	Pendapatan Transfer	673.519.373.831	725.111.585.050	729.524.480.698	727.998.731.640	759.145.125.544
3	Lain-lain Pendapatan yang sah	28.265.176.174	37.506.994.144	28.273.382.233	36.835.111.691	25.880.775.058
B	BELANJA	815.924.188.66 7	869.834.833.06 1	856.849.207.88 1	832.842.954.5 27	958.900.4 05.458
1	Belanja Operasi	637.693.659.444	665.522.251.810	652.518.705.424	642.256.183.717	680.273.793.264
2	Belanja Modal	178.230.529.223	204.312.581.251	161.864.562.764	171.003.696.598	272.775.064.705
3	Belanja Tak Terduga	0	0	42.465.939.693	19.583.074.212	5.851.527.469
4	Transfer	0	0	0	0	0
	Surplus/(Defisit)	76.634.189.987	91.420.447.056	76.479.783.757	27.557.693.982	(66.826.189.540)

Sumber: BPKAD Kota Baubau (Data Diolah) 2023

Berdasar pada tabel 1 di atas, diketahui bahwa realisasi anggaran Kota Baubau tahun 2018-2022 secara umum cenderung mengalami peningkatan, meskipun juga terjadi penurunan pendapatan pada tahun 2022 yang mengakibatkan terjadi periode anggaran senilai Rp 66.826.189.540. Pendapatan daerah Kota Baubau didominasi oleh pendapatan yang bersumber dari pendapatan transfer, sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) periode masih sangat kecil terhadap seluruh total pendapatan. Selanjutnya ditinjau dari aspek belanja daerah yang terdiri atas belanja operasi dan belanja modal, belanja operasi memiliki porsi pengeluaran yang lebih tinggi jika periode ke dengan belanja modal. Realisasi kedua belanja tersebut cenderung mengalami peningkatan di setiap tahun.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul "Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Baubau". Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Baubau dalam penelitian ini adalah suatu proses penilaian mengenai periode kemajuan pencapaian pelaksanaan pekerjaan/kegiatan Pemerintah Daerah Kota Baubau dalam bidang keuangan untuk kurun waktu 2018-2022. Rasio yang digunakan oleh peneliti dalam menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Baubau pada penelitian ini adalah Rasio Kemandirian, Rasio efektivitas, Rasio Aktivitas, dan Rasio Pertumbuhan.

METODE

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: Data Kualitatif yaitu data yang diperoleh dalam bentuk uraian atau penjelasan baik lisan maupun tulisan (Sugiyono, 2014) Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka, atau data kualitatif yang diangkakan (Sugiyono, 2014).

Penelitian ini akan dilaksanakan mulai bulan Oktober sampai Desember tahun 2022. Tempat penelitian ini pada Kantor Badan Pengelola Keuangan, Aset dan Pendapatan Daerah Kota Baubau, dengan alamat Jalan Palagimata Kelurahan Lipu Kecamatan Betoambari Kota Baubau Propinsi Sulawesi Tenggara yang beralamatkan di Jalan Betoambati Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara. Sugiyono (2017:80) menyatakan bahwa populasi adalah wilayah generalisasi objek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Penelitian ini menggunakan populasi

sebagai sumber data. Populasi dalam penelitian ini adalah laporan keuangan Badan Pengelola Keuangan, Aset dan Pendapatan Daerah Kota Baubau yang dikhususkan dalam sektor target dan realisasi retribusi penerimaan pajak daerah. Sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah laporan keuangan Badan Pengelola Keuangan, Aset dan Pendapatan Daerah Kota Baubau yang dikhususkan dalam sektor target dan realisasi retribusi penerimaan kota Baubau tahun 2018 sampai tahun 2022.

Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah metode analisis deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan kinerja keuangan Pemerintah Kota Baubau berdasarkan Rasio Kinerja Keuangan.

a. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD)

$$\text{RKKD} = \frac{\text{PAD}}{\text{Pendapatan Transfer}} \times 100\%$$

b. Rasio Efektivitas Dan Efisiensi Pendapatan Asli Daerah

1) Rasio efektivitas

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Anggaran PAD}} \times 100\%$$

2) Rasio Efisiensi

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Biaya Yang Dikeluarkan Untuk Memungut PAD}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

c. Rasio Aktivitas

1) Rasio Belanja Operasi

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

2) Rasio Belanja Modal

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

d. Rasio Pertumbuhan

$$\text{Rasio Pertumbuhan} = \frac{\text{RpXn} - \text{RpXn} - 1}{\text{RpXn} - 1} \times 100\%$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Baubau

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Baubau dalam penelitian ini adalah suatu proses penilaian mengenai periode kemajuan pencapaian pelaksanaan pekerjaan/kegiatan Pemerintah Daerah Kota Baubau dalam bidang keuangan untuk kurun waktu 2018-2022. Rasio yang digunakan oleh peneliti dalam menganalisis kinerja

keuangan Pemerintah Daerah Kota Baubau pada penelitian ini adalah: Rasio Kemandirian, Rasio efektivitas, Rasio Aktivitas, dan Rasio Pertumbuhan. Data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Baubau yang diperoleh dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Baubau.

Dari data tersebut akan dapat diketahui Kinerja Keuangan Kota Baubau. Adapun hasil dari analisis Rasio tersebut adalah:

a. Rasio Kemandirian

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Pemerintah daerah Kota Baubau Periode Tahun 2018-2022 ditunjukkan pada tabel 2.

Tabel 2. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Pemerintah daerah Kota Baubau Periode Tahun 2018-2022

No	Tahun Anggaran	PAD	Pendapatan Transfer	Rasio Kemandirian	Keterangan
1	2018	67.321.910.993	673.519.373.831	9,99%	Rendah sekali
2	2019	85.976.625.925	725.111.585.050	11,86%	Rendah sekali
3	2020	87.011.274.771	729.524.480.698	11,93%	Rendah sekali
4	2021	95.566.805.178	727.998.731.640	13,13%	Rendah sekali
5	2022	107.046.315.216	759.145.125.544	14,10%	Rendah sekali

Sumber: BPKAD Kota Baubau (Data Diolah) 2023

Keterangan (%):

Rendah sekali : 0% - 25%

Rendah : 25% - 50%

Sedang : 50% - 75%

Tinggi : 75% - 100%

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 2 kemampuan keuangan Pemerintah Daerah Kota Baubau tergolong masih rendah sekali dan pola hubungannya termasuk pola hubungan Instruktif dimana peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah). Terjadi kenaikan dari tahun 2018 sampai tahun 2022. Berawal pada tahun 2018 Rasio Kemandirian sebesar 9,99%, kemudian naik menjadi 11,86% pada tahun 2019. Pada tahun 2020 Rasio Kemandirian naik sebesar 11,93%. Pada tahun 2021 terjadi kenaikan menjadi 13,13% dan tahun 2022 terjadi kenaikan sebesar 14,10%. Menurut uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Rasio Kemandirian Keuangan Daerah selama lima tahun pada Pemerintah Kota Baubau memiliki rata-rata kemandiriannya masih tergolong rendah sekali dan dalam kategori kemampuan keuangan kurang dengan pola hubungan Instruktif yaitu peranan pemerintah pusat masih sangat dominan dibandingkan pemerintah daerah, ini dapat dilihat dari rasio kemandirian keuangan daerah masih tergolong dalam interval 0%-25%. Rasio Kemandirian yang masih rendah sekali mengakibatkan kemampuan keuangan daerah Kota Baubau dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah masih sangat tergantung bantuan dari pemerintah pusat. Jadi kemandirian keuangan pemerintah daerah Kota Baubau secara keseluruhan dapat dikatakan sangat rendah sekali, hal ini menggambarkan bahwa periode ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal masih sangat tinggi.

b. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Rasio Efektivitas menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi rasio efektivitas, maka semakin baik kinerja pemerintah daerah. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Pemerintah daerah Kota Baubau Periode Tahun 2018-2022 ditunjukkan pada tabel 3.

Tabel 3. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Pemerintah daerah Kota Baubau Periode Tahun 2018-2022

No	Tahun Anggaran	Anggaran PAD	Realisasi PAD	Ratio Efektifitas	Keterangan
1	2018	72.681.399.292	67.321.910.993	92,63%	Cukup efektif
2	2019	75.716.998.748	85.976.625.925	113,55%	Sangat efektif
3	2020	102.818.041.270	87.011.274.771	84,63%	Cukup efektif
4	2021	111.775.067.051	95.566.805.178	85,50%	Cukup efektif
5	2022	114.485.466.979	107.046.315.216	93,50%	Cukup efektif

Sumber: BPKAD Kota Baubau (Data Diolah) 2023

Keterangan (%):

Sangat efektif : > 100%
Efektif : 100%
Cukup efektif : 90% - 99%
Kurang efektif : 75% - 89%
Tidak efektif : < 75%

Berdasarkan perhitungan pada tabel 3 menunjukkan bahwa Efektivitas PAD Keuangan Pemerintah Daerah Kota Baubau pada tahun 2019 sebesar 113,55%, tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 84,63%, kemudian ditahun 2021 kembali mengalami kenaikan sebesar 85,50%, dan pada tahun 2022 terus mengalami kenaikan sebesar 93,50%. Efektivitas kinerja keuangan Kota Baubau untuk tahun 2019 berjalan sangat efektif karena efektivitasnya diatas 100%. Untuk tahun 2020-2022 cukup efektif karena nilai yang diperoleh kurang dari 100%. Menurut uraian dan hasil perhitungan pada tabel 3 Efektivitas Kinerja Keuangan Kota Baubau Masih Cukup Efektif karena rata-rata efektivitasnya 93,96%. Hal ini disebabkan karena penerimaan dari sektor pajak dan retribusi daerah melebihi dari yang dianggarkan sebelumnya.

c. Rasio Aktivitas

Rasio Aktivitas menggambarkan bagaimana pemerintahan daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja operasi dan belanja modal secara optimal. Rasio Aktivitas Belanja Pemerintah daerah Kota Baubau Periode Tahun 2018-2022 ditunjukkan pada tabel 4 dan 5.

Tabel 4. Rasio Belanja Operasi Pemerintah daerah Kota Baubau Periode Tahun 2018-2022

No	Tahun Anggaran	Total Belanja	Belanja Operasi	RBO	Keterangan
1	2018	815.924.188.667	637.693.659.444	78,16%	Baik
2	2019	869.834.833.061	665.522.251.810	76,51%	Baik
3	2020	856.849.207.881	652.518.705.424	76,15%	Baik
4	2021	832.842.954.527	642.256.183.717	77,12%	Baik
5	2022	958.900.405.458	680.273.793.264	70,94%	Baik

Sumber: BPKAD Kota Baubau (Data Diolah) 2023

Keterangan (%):

Tidak Baik : 0% - 50%

Baik : 50% - 100%

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 4 di atas diketahui bahwa rata-rata Rasio Aktivitas Belanja Operasi DPPKAD Kota Baubau 75,78%. Dimulai pada tahun 2018 di mana rasionya sebesar 78,16% kemudian mengalami penurunan pada tahun 2019 menjadi 76,51%, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi 76,15%, kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2021 menjadi 77,12% dan Kembali mengalami penurunan menjadi 70,94% pada tahun 2022.

Tabel 5. Rasio Belanja Modal Pemerintah daerah Kota Baubau Periode Tahun 2018-2022

No	Tahun Anggaran	Total Belanja	Belanja Modal	RBM	Keterangan
1	2018	815.924.188.667	178.230.529.223	21,84%	Tidak Baik
2	2019	869.834.833.061	204.312.581.251	23,49%	Tidak Baik
3	2020	856.849.207.881	161.864.562.764	18,89%	Tidak Baik
4	2021	832.842.954.527	171.003.696.598	20,53%	Tidak Baik
5	2022	958.900.405.458	272.775.064.705	28,45%	Tidak Baik

Sumber: BPKAD Kota Baubau (Data Diolah) 2023

Keterangan (%):

Tidak Baik : 0% - 50%

Baik : 50% - 100%

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 5 di atas diketahui bahwa rata-rata Rasio Aktivitas Belanja Modal Pemerintah Daerah Kota Baubau adalah 22,64%. Dimulai pada tahun 2018 dimana rasionya sebesar 21,84% mengalami kenaikan pada tahun 2019 menjadi 23,49%, kemudian mengalami penurunan menjadi 18,89% pada tahun 2020, kemudian mengalami kenaikan menjadi 20,53% pada tahun 2021 dan kemudian mengalami kenaikan menjadi 28,45% pada tahun 2022. Menurut uraian dan perhitungan di atas bahwa periode besar dana yang dimiliki Pemerintah Daerah masih diprioritaskan untuk kebutuhan belanja operasi sehingga rasio belanja modal periode kecil. Ini dapat dibuktikan dari rata-rata rasio belanja operasi yang masih besar dibandingkan dengan rata-rata rasio belanja modal. Besarnya alokasi dana untuk belanja operasi terutama dikarenakan besarnya dinas-dinas otonomi dan belanja pegawai untuk gaji PNS. Dengan ini dapat menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Baubau yang lebih condong pada pengeluaran-pengeluaran rutin untuk pemenuhan aktivitas Pemerintahan dan belum memperhatikan periode ke daerah. Hal ini dikarenakan belum ada patokan yang pasti untuk belanja modal, sehingga Pemerintah Daerah masih berkonsentrasi pada pemenuhan belanja operasi yang mengakibatkan belanja modal untuk Pemerintah Kota Baubau kecil atau belum terpenuhi.

d. Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan (growth ratio) Halim (2014) rasio pertumbuhan dimaksudkan untuk mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang dicapai dari periode ke periode berikutnya. Rasio pertumbuhan dikatakan baik, jika setiap tahunnya mengalami pertumbuhan positif atau mengalami peningkatan. Rasio Pertumbuhan Pemerintah daerah Kota Baubau Periode Tahun 2018-2022 ditunjukkan pada gambar 1.



$RpX_n - X_{n-1}$ = Realisasi tahun yang dikurangi tahun sebelumnya.

RpX_{n-1} = Realisasi penerimaan tahun sebelumnya.

Dengan kriteria sebagai berikut:

Rendah : 0% - 25%

Sedang : 25% - 50%

Tinggi : 50% - 100%

Sumber: DPPKAD Kota Baubau (Data Diolah) 2023

Gambar 1. Pertumbuhan Pemerintah daerah Kota Baubau Periode Tahun 2018-2022 Dari perhitungan rasio pertumbuhan mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Dari gambar 1 menunjukkan bahwa pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tahun 2018 ke tahun 2019 hanya mencapai 27,71% dengan kategori pertumbuhan yang sedang, artinya bahwa potensi yang ada pada sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang meliputi: pajak daerah, retribusi daerah serta pendapatan lain-lain yang sah belum dikelola secara maksimal. Jika dilihat pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2020 sebesar 1,20% dengan kategori pertumbuhan yang rendah. Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2021 kembali naik sebesar 9,83% diakibatkan oleh pertumbuhan ekonomi masyarakat semakin membaik sehingga terjadi kesadaran masyarakat dalam membayar kewajiban sebagai wajib pajak serta membayar retribusi atas penggunaan jasa-jasa fasilitas pemerintah daerah. Dan dilihat pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tahun 2022 kembali terjadi peningkatan sebesar 12,01% hal tersebut juga diikuti pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2022. Kondisi ini diakibatkan oleh meningkatnya pengelolaan pendapatan asli daerah serta pendapatan lain-lain yang sah milik pemerintah daerah.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, Komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah daerah yaitu sebagai berikut:

- Laporan Realisasi Anggaran Laporan realisasi anggaran merupakan laporan yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Informasi yang disajikan mengenai realisasi pendapatan, belanja, penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan pemerintah pusat/daerah.
- Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Laporan perubahan saldo anggaran lebih menyajikan informasi mengenai kenaikan dan penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan dan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
- Neraca Neraca merupakan laporan yang menyajikan mengenai aset, kewajiban serta ekuitas pada akhir periode tertentu.
- Laporan Operasional Laporan operasional merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional berupa ikhtisar sumber daya ekonomi

yang menambah ekuitas serta penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode.

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dilakukan untuk memenuhi 3 tujuan yaitu (Mardiasmo, 2016):

1. Memperbaiki kinerja pemerintah daerah.
2. Membantu mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan.
3. Mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan

Rasio Keuangan Pemerintah Daerah

Alat rasio keuangan yang digunakan adalah analisis rasio yang dikembangkan berdasarkan data keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (Halim, 2014:267) yaitu:

a. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD)

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah ditunjukkan oleh besarnya Pendapatan Asli Daerah dibandingkan dengan Pendapatan Daerah yang berasal dari sumber lain (Pendapatan Transfer) antara lain : Bagi hasil pajak, Bagi hasil bukan pajak sumber daya alam, Dana alokasi umum dan Alokasi khusus, Dana darurat dan pinjaman. Rumus yang digunakan untuk menghitung Rasio Kemandirian adalah:

$$RKKD = \frac{PAD}{Pendapatan Transfer} \times 100\%$$

Dengan kriteria sebagai berikut:

- Rendah sekali : 0% - 25%
Rendah : 25% - 50% Sedang : 50% - 75%
Tinggi : 75% - 100%

b. Rasio Efektivitas Dan Efisiensi Pendapatan Asli Daerah

- 1) Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Kemampuan daerah dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai mencapai minimal sebesar 1 (satu) atau 100 persen.

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Anggaran PAD}} \times 100\%$$

Dengan kriteria sebagai berikut:

- Sangat efektif : > 100%
Efektif : 100%
Cukup efektif : 90% - 99%
Kurang efektif : 75% - 89%
Tidak efektif : < 75

- 2) Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Untuk itu pemerintah daerah perlu menghitung secara cermat berapa besarnya biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan seluruh

pendapatan yang diterimanya sehingga dapat diketahui apakah kegiatan pemungutan pendapatannya tersebut efisien atau tidak. Hal itu perlu dilakukan karena meskipun pemerintah daerah berhasil merealisasikan penerimaan pendapatan sesuai dengan target yang ditetapkan, namun keberhasilan itu kurang memiliki arti apabila ternyata biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan target penerimaan pendapatannya itu lebih besar dari pada realisasi pendapatan yang diterimanya. Kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau di bawah 100 persen.

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Biaya Yang Dikeluarkan Untuk Memungut PAD}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

c. Rasio Aktivitas

Rasio Keserasian menggambarkan bagaimana pemerintahan daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja operasi dan belanja modal secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja operasi berarti persentase belanja modal yang digunakan untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil. Secara sederhana, rasio keserasian itu dapat diformulasikan sebagai berikut (Halim 2014:236):

1) Rasio Belanja Operasi

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

2) Rasio Belanja Modal

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Dengan kriteria sebagai berikut:

Tidak Baik : 0% - 50%
Baik : 50% - 100%

d. Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan (*growth Ratio*) mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang dicapai dari periode ke periode berikutnya. Rasio pertumbuhan dikatakan baik, jika setiap tahunnya mengalami pertumbuhan positif atau mengalami peningkatan.

$$\text{Rasio Pertumbuhan} = \frac{RpXn - RpXn - 1}{RpXn - 1} \times 100\%$$

Keterangan:

$RpXn - Xn - 1$ = Realisasi tahun yang dikurangi tahun sebelumnya.

$RpXn - 1$ = Realisasi penerimaan tahun sebelumnya.

Dengan kriteria sebagai berikut:

Rendah : 0% - 25%
Sedang : 25% - 50%
Tinggi : 50% - 100%

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat ditarik simpulan sebagai berikut: (1) Kinerja keuangan pemerintah daerah kota Baubau jika dilihat dari rasio kemandirian

keuangan daerah tergolong rendah sekali, karena masih tergolong dalam interval 0%-25%. Berturut-turut dari tahun 2018 sampai dengan 2022 rasionya masing-masing sebesar: 9,99%; 11,86%; 11,93%; 13,13% dan 14,10%. (2) Kinerja keuangan pemerintah daerah kota Baubau jika dilihat dari rasio efektivitas PAD diketahui bahwa efektivitas keuangan Pemerintah Daerah Kota Baubau tahun 2018, 2020, 2021 dan 2022 berjalan cukup efektif yang ditunjukkan dengan nilai rasio antara 90% - 99% secara berturut-turut sebesar 92,63%, 84,63%, 85,50% dan 93,50%, namun pada tahun 2019 berjalan sangat efektif dengan nilai rasio mencapai 107,3%. (3) Rasio aktivitas dari sisi rasio belanja operasi tergolong baik yakni dengan nilai rasio antara 50%-100% atau dengan nilai rata-rata 75,78% per tahun sedangkan rasio belanja modal tergolong tidak baik karena memiliki nilai rasio kurang dari 50% atau dengan nilai rata-rata pertahun sebesar 22,64% per tahun). (4) Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Baubau mengalami perkembangan dari tahun ke tahun dengan kategori pertumbuhan rendah (1,20%) untuk tahun 2020, namun rasio pertumbuhan pada tahun 2019 mengalami peningkatan yakni dengan kategori pertumbuhan sedang (27,71%), dan di tahun 2021 kembali mengalami peningkatan walaupun dengan kategori pertumbuhan rendah (9,83%) dan tahun 2022 kembali mengalami peningkatan walaupun dengan kategori rendah (12,01%).

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. 2014. *Manajemen Keuangan Sektor Publik problematika penerimaan dan pengeluaran pemerintah*. Jakarta: Selemba Empat.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Muhammad Zuhri Ahmad Soleh. 2016. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur. *Ekombis Review Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. Vol 4 No 2.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.